

**POLA KADERISASI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI
AMANAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

Vico Bagja Lukito



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

THE REGENERATION PATTERN OF PROVINCIAL DIRECTOR COUNCIL OF PARTAI AMANAT NASIONAL IN LAMPUNG PROVINCE

By

VICO BAGJA LUKITO

This study aimed at describing pattern of regeneration that occurred through elements including process of selection, process of education, process of binding, and process of escorting which were applied in the regeneration pattern of Partai Amanat Nasional (PAN). The case study were carried out on application of the regeneration pattern by PAN Provincial Director Council of Lampung Province

The study was designed in qualitative form. The data collection used in-depth interview technique. The determination of informant employed *purposive sampling* by selecting party board directly involved in the regeneration process as well as some party members outside the management. The Information was then analyzed to draw inferences in accordance with reality in the field by methods of data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification.

The findings evidently revealed that (1) the application of regeneration pattern by PAN Provincial Director Council of Lampung Province was still not optimal; (2) the overlapping of authority occurred in carrying out formal education processes between Provincial Director Council and Regional Director Council which resulted in delay of formal education process in form of LKAM which should be held by PAN Provincial Director Council of Lampung Province at least once a year; and (3) the escorting process was still weak since the criminal acts of corruption were still committed by cadres as regional heads.

Keywords: Regeneration, Political Parties, PAN Provincial Director Council of Lampung Province

ABSTRAK

POLA KADERISASI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

Oleh

VICO BAGJA LUKITO

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pola kaderisasi yang terjadi melalui unsur-unsur diantaranya proses pilih, proses didik, proses ikat dan proses pengawalan yang digunakan pada pola kaderisasi Partai Amanat Nasional (PAN). Studi kasus dilakukan pada penerapan pola kaderisasi oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Penentuan informan secara *purposive sampling* dengan memilih pengurus partai yang terlibat langsung pada proses kaderisasi serta beberapa anggota partai diluar pengurus. Informasi dianalisis guna menarik kesimpulan yang sesuai dengan realitas di lapangan dengan metode reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, penerapan pola kaderisasi oleh DPW PAN Provinsi Lampung masih kurang maksimal. Kedua, terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam menyelenggarakan proses didik secara formal antara DPW dan DPD yang mengakibatkan terhambatnya proses didik secara formal berupa LKAM yang seharusnya diselenggarakan oleh DPW PAN Provinsi Lampung minimal satu tahun sekali. Ketiga, proses pengawalan masih dirasa kurang karena terjadinya tindak pidana korupsi oleh kader sebagai kepala daerah.

Kata Kunci: Kaderisasi, Partai Politik, DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung.

**POLA KADERISASI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI
AMANAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Vico Bagja Lukito

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **POLA KADERISASI DEWAN PIMPINAN
WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Vico Bagja Lukito**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1216021110**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



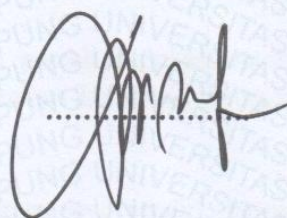
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP



Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarief Makhya, M.Si
NIP. 195908031986031003**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 1 April 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 April 2019
Yang Membuat Pernyataan



Vico Bagja Lukito
NPM. 1216021110

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09 Oktober 1994, anak pertama dari pasangan Ayah Budi Lukito, S.S. dan Ibu Yulia Watiningsih, S.E.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis ialah pendidikan dasar di SD Swasta Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006. Jenjang pendidikan berikutnya di SMP Negeri 7 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2009. Serta jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Kotabumi yang diselesaikan tahun 2012.

Pada tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tertulis. Selama berada di dunia kampus, penulis terlibat aktif pada berbagai aktivitas organisasi. Kegiatan ini penulis lakukan selain untuk memanfaatkan waktu luang juga untuk mengembangkan kemampuan dan memenuhi kebutuhan dalam mengaktualisasikan diri.

Masuk dalam aktifitas organisasi kampus, penulis aktif dibeberapa organisasi internal dan eksternal kampus, seperti:

Internal Kampus :

1. Sekretaris Biro 1 HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Periode 2013 – 2014.
2. Ketua Umum HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Periode 2014-2015.
3. Ketua Komisi 2 DPM-F FISIP Unila Periode 2015 – 2016.

Eksternal Kampus :

1. Anggota Biasa HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Unila pada tahun 2013.
2. Departemen PPPA HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Unila periode 2014-2015.
3. Sekretaris Umum HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Unila periode 2015-2016.
4. Bendahara Umum BPL HMI Cabang Bandar Lampung periode 2015-2018.
5. Anggota Bidang Hubungan Internasional PB HMI periode 2018-2020.

Sebagai bentuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama berkuliah di Jurusan Sosiologi penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diadakan Universitas Lampung sebagai Koordinator Mahasiswa tingkat Kabupaten pada tahun 2016 di desa Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Timur – Tanggamus.

MOTTO

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridho’I Islam sebagai agamamu”

(Al-Ma’idah (05) : 03)

**Great Men aren’t Born Great, They Grow Great
(Mario Puzo, The Godfather)**

“jika kita adalah satu tim yang baik dan tahu apa yang ingin kita lakukan, satu orang saja dari kita bisa mengalahkan sepuluh kompetitor kita”

(Jack Ma)

“ide terbaik adalah ide yang terealisasi”

(Vico Bagja Lukito)

#SAVEPALESTINE

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Rasa Syukur dan Kerendahan Hati Saya Persembahkan

Skripsi Sederhana ini untuk :

Kedua Orang Tuaku

Ayahku Budi Lukito, S.S dan Ibuku Yulia Watiningsih S.E

Terimakasih atas motivasi yang tidak pernah putus di dalam do'a, kasih dan sayang yang tulus selalu menjadi semangat ketika lelah dan dengan penuh kesabaran tetap membekali ku pendidikan dan iman, tanpa lelah selalu mewarnai perjalanan hidupku.

Adik ku

Melia Megawati, Calon Dokter kebanggaan Keluarga.

Seluruh **Keluarga Besarku** dan **Sahabat sehipun secita** yang selalu memberikan warna dan pelajaran dalam hidup.

Almamater tercinta **Universitas Lampung**

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji senantiasa terucap hanya untuk Allah SWT yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Senandung Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang mengangkat peradaban dari zaman jahiliah menuju zaman terang benderang kaya akan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang, sebagai juru kunci keselamatan di akhirat kelak, ialah Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Telah terealisasinya skripsi sederhana yang menjadi penutup karya penulis di S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan Judul **“Pola Kaderisasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung”** bisa terselesaikan.

Bukanlah sebagai pemenuhan salah satu prasyarat dalam meraih gelar sarjana semata hadirnya karya ini. Lebih jauh dari itu, karya ini merupakan wujud nyata penulis dalam melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian. Penulis berharap karya ini bisa jadi bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa Universitas Lampung.

Manusia adalah makhluk yang heterogen, karenanya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam mencapai tujuannya, tanpa bantuan itu manusia akan sulit mencapai apa yang ingin didapatkannya. Dengan ketulusan yang hadir dari palung hati ini penulis berharap Allah SWT dapat membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus penguji utama yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Darmawan Purba, S.I.P, M.I.P. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Serta sebagai Pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, saran, dan kritikan yang sangat membangun dan berguna dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan dan Staf/Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang banyak membantu.
5. Seluruh Pengurus dan Kader DPW PAN Provinsi Lampung serta Kanda Ramadhan Nawawi selaku Tim Sekretariat yang sudah memberi banyak informasi bagi saya dan semua informan yang sudah sangat baik dan ramah menyambut kedatangan saya di sekretariat, terimakasih.
6. Ayah saya Budi Lukito, S.S. dan Ibu saya Yulia Watiningsih, S.E. tercinta, yang telah membesarkan, membimbing serta memberikan cinta dan kasih

sayangnya dengan penuh kesabaran selama ini yang selalu menjadi penyemangat hidup, terimakasih untuk waktu yang tidak akan pernah dapat terganti.

7. Adik tercinta satu-satunya Melia Megawati yang selalu menjadi teman dan memberi warna dalam pertumbuhan sebagai pemecah kesepian dan kebanggaan keluarga.
8. Seluruh keluarga besar Among Bahram, Abu dan Bapak, untuk do'a dan semangat yang tidak pernah padam, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan waktu yang panjang untuk dapat berkumpul.
9. Cyntia Chandra Jaya, S.Sos., terimakasih untuk semangat positif yang selalu diberikan, terimakasih untuk semua emosi yang mewarnai perjalanan kehidupanku sebagai mahasiswa dikampus tercinta, yang selalu setia menghiasi hari dalam kesulitan.
10. Untuk seluruh rekan perjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2012 Tanpa Terkecuali, terimakasih atas bantuan kalian semua baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk Kader HMI Komisariat Sosial Politik Unila 2012, Juwanda, Purnama Aulia , Nick Kurniawan , Nico Purwanto, Rizki Hendarji, Hezby Fauzan, Rosim Nyrupa, Fatih, LuthfiNugrawa Wijaya. Karena di HMI kita “Berteman” lebih dari “Saudara”, Kalian luar biasa.
12. Untuk seluruh mentor, Kanda Isma'il As'ard, Kanda Arip Mustopa, Kanda Yahnu, Kanda Aziz Amriwan, Kiyai Mamau, Kanda Apri, Kanda Gema, Kanda Hardian Ruswan, Kanda Hendra Fauzi, Kanda Junian, Kanda Angga, Kanda Hafiz, Kanda Destoni, Kanda Ramadhan, Kanda Iin, Kanda Robby, Kanda Putra, Kanda Okta, Kanda Radit, Kanda Ekky, Kanda Gusti.

13. Untuk seluruh rekan perjuangan BPL HMI Cabang Bandar Lampung Periode Kepengurusan 2015-2018 Tanpa Terkecuali.
14. Untuk seluruh rekan perjuangan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode Kepengurusan 2018-2020 Tanpa Terkecuali.
15. Untuk seluruh rekan perjuangan HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Periode 2014-2015, Winda Dwiastuti, Arum Rahma Sari, Nissa Nurul Fathia, Danang Marhaen, Tiyas Apriza, Cici.
16. Untuk Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
17. Untuk seluruh Kader dan Alumni Keluarga Besar Tondano'35 (*Yakin Usaha Sampai "YAKUSA"*)
18. Untuk seluruh sahabat FBBC, Fajar, Ateng, Roland, Riki, Sahril, Ridho, Arrazi, Reza, Fakhrizal, Endri, Richat, Hadid, Aisy, Yoga.
19. Untuk seluruh sahabat Kita Bisa, Aznan Pratama Tabah, S.H., M. Yudhi Guntara, S.H., A. Fauzan Amin, A.Md, Nico Fajar Januar S.E, M. Juan Kara, Danny Fhaisal Akbar, Fajri Abdillah, S.Pd, Ruben Sitinjak, S.Pd.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga Skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, April 2019
Penulis

Vico Bagja Lukito

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
SANWACANA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kaderisasi.....	16
1.Pengertian Kader dan Kaderisasi	16
2.Prinsip-Prinsip Kaderisasi.....	17
3.Tujuan Kaderisasi	18

B. Tinjauan tentang Partai Politik.....	20
1.Pengertian Partai Politik	20
2.Fungsi Partai Politik.....	20
3.Tipologi Partai Politik.....	22
C. Kaderisasi Partai Politik.....	25
1.Partai Kader	25
2.Kriteria Kader	26
3.Jengjang Pengkaderan Ideal.....	28
4.Pola Kaderisasi Partai Politik.....	31
D. Kerangka Pikir	36

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	38
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Pengelolaan Data	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Teknik Keabsahan Data	47
I. Penentuan Informan.....	48

BAB IV. GAMBARAN UMUM

A. Profil Partai Amanat Nasional.....	50
B. Lambang Partai Amanat Nasional dan Artinya.....	54
C. Visi, Misi, Fungsi Dan Struktur Kepemimpinan Partai Amanat Nasional ...	55
D. Anggota Kader Dan Simpatisan.....	57
E. Sistem Kaderisasi	58
F. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung.....	59

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pilih	65
B. Proses Didik.....	71
C. Proses Ikat	79
D. Proses Pengawasan	85

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah tindak pidana kasus korupsi di Indonesia.....	7
1.2. Subjek yang melakukan tindak pidana korupsi	7
1.3. Daftar Pejabat Daerah OTT KPK Tahun 2018	8
1.4. Daftar Partai Peserta Pemilu 2019	11
2.1. Perbedaan Kriteria Kader antara Partai Massa dan Partai Kader	27
5.1. Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Asal Partai Amanat Nasional.....	82
5.2. Jumlah Suara Partai Amanat Nasional Ketika Pemilu.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	37
2. Lambang Partai Amanat Nasional.....	37
3. Aktivitaas DPW PAN Bersama BM PAN Lampung	76
4. Latihan Kader Amanat Dasar oleh DPW PAN Provinsi Lampung.....	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses keberlangsungan sebuah negara tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan politik, pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan strategis yang di ambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat (Miriam Budiardjo, 2003:19). Kepentingan seluruh masyarakat menjadi prioritas yang harus di perjuangkan oleh sebuah negaramengingat dibentuk pada suatu wilayah oleh masyarakatnya sehingga memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh masyarakatnya.

Perkembangan yang terjadi saat ini, negara membutuhkan sistem politik yang dapat mengatur interaksi antara kepentingan yang berada ditengah masyarakat sehingga negara dapat tetap mempertahankan kesatuan masyarakat. David Easton berpendapat bahwa suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif, dan ini hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Namun pada dasarnya sistem politik dapat dimulai jika terdapat *input* berupa dukungan atau tuntutan kepada lembaga berwenang (Beddy Iriawan Maksudi, 2013:23).

Beragam sistem politik yang ada, dapat diterapkan dalam dukungan atau tuntutan dalam pengelolaan negara yakni sistem politik yang otoriter maupun sistem politik yang demokratis. Sistem politik yang bersifat otoriter dapat kita lihat penerapannya di beberapa negara, seperti Korea Utara, Suriah, Kongo, Turkmenistan dan lainnya. Sistem politik otoriter menggambarkan kepemimpinan yang absolut, dimana keputusan dalam suatu negara terpusat, hanya ditentukan oleh kepala negara tanpa melibatkan rakyatnya. Berbeda dengan sistem politik yang bersifat demokratis, sistem politik ini mengedepankan kedaulatan rakyat, negara menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (Yudi Latif, 2012:383), dengan demikian rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan oleh negara. Amerika Serikat dan Indonesia menjadi contoh Negara yang menjalankan sistem politik demokratis.

Demokrasi adalah alat untuk memberikan sesuatu yang baik bagi manusia terutama dalam menghadapi kekuasaan yang represif (Anwar Arifin, 2011:43). Perjalanan demokrasi telah mencakup asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa ke masa, yaitu gagasan demokrasi mengenai kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta konflik agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di Negarakota (*city state*) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M.) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga

Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas (Miriam Budiardjo, 2013:109).

Demokrasi langsung menjadi pilihan yang diterapkan dalam negara yang memiliki jumlah penduduk sedikit, sehingga masyarakat yang berada dinegara tersebut dapat langsung menyampaikan gagasan untuk keberlangsungan negara tersebut, namun dalam perkembangannya praktek demokrasi langsung tidak lagi dijalankan, karena pertumbuhan penduduk pada suatu negara semakin tinggi, oleh sebab itu proses perubahan pada sistem politik secara berkelanjutan menuju tatanan yang lebih demokratis sangat diperlukan (Kenneth Newton & Jan W. Van Deth, 2016:67).

Demokrasi tidak langsung (*representative democracy*) menjadi alternatif pilihan sebagai antitesa dari permasalahan tersebut, demokrasi tidak langsung menghendaki keberlangsungan proses demokrasi pada suatu negara melalui keterwakilan.

Indonesia sebagai negara demokrasi mengalami pasang surut dalam perkembangan berdemokrasi. Hal ini dapat kita lihat dalam proses berdemokrasi yang pernah dipraktikkan di Indonesia, mulai dari demokrasi konstitusional dan demokrasi terpimpin pada masa orde lama, hingga masa demokrasi pancasila yang dipraktikkan pada masa orde baru. Pada dua masa itu untuk dapat mem-pertahankan kekuasaan presiden dan keterwakilan rakyat pada lembaga legislatif dilakukan dengan cara-cara yang nepotisme dan korupsi sehingga yang terjadi adalah praktek penyelenggaran negara yang otoriter, jauh dari semangat demokratisasi. Ketika tumbangnya rezim

orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia, pengalaman orde baru telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran yang terjadi terhadap demokrasi membawa kehancuran pada negara dan memberikan penderitaan kepada rakyat. Pasca orde baru dipandang perlu melakukan optimalisasi terhadap lembaga legislatif, hal ini ditandai dengan disahkannya undang-undang tentang partai politik, pemilihan umum, serta susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai lembaga legislatif yang melakukan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran terhadap proses penyelenggaraan negara.

Hasil dari reformasi hukum dan politik yang terjadi di Indonesia mengantarkan Indonesia pada kondisi dimana proses demokratisasi menjadi lebih terbuka dan memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam mengekspresikan pendapat serta berkontribusi secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara. Orang-orang yang diamanahkan oleh masyarakat untuk dapat menduduki jabatan politik baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif ataupun eksekutif diharapkan dapat mampu membuat reguliasi atas aspirasi yang diterima dari masyarakat dan kemudian di proses secara bersama-sama.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik BAB V Pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa Peran dan fungsi partai politik menjadi salah satu hal terpenting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, mengingat bahwa salah satu tujuan umum partai politik di Indonesia adalah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua puluh tahun pasca reformasi, Indonesia telah 3 (tiga) kali melakukan proses pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memilih Wakil Rakyat dalam mengisi jabatan pada kelembagaan legislatif. Pemilu dipilih sebagai instrumen untuk melaksanakan proses demokrasi prosedural, karena dengan pemilu setiap warga negara dapat terlibat langsung dalam memilih wakilnya untuk mewakili dirinya pada kelembagaan legislatif, orang-orang yang berada di parlemen tersebut adalah mereka yang telah dipersiapkan oleh partai politik dan juga kepala daerah yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan mewakili masyarakat melalui partai politik.

Ichsul Amal mengungkapkan bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis (A. Gau Kadir, 2014:132). Partai politik sebagai satu-satunya lembaga demokrasi yang mengirimkan kader-kadernya untuk menjadi pejabat publik baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, oleh karena itu partai politik diharuskan dapat mencetak kader yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan bersih dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik.

Partai politik juga menjadi wadah dalam menampung aspirasi masyarakat untuk di bahas bersama parlemen sehingga dapat melahirkan peraturan dan solusi dalam mengatasi permasalahan yang lahir di tengah masyarakat, hal ini

harus menjadi inisiatif dari anggota partai politik untuk tetap menghidupkan nyawa dari demokrasi itu sendiri, partai politik tidak hanya menunggu kehendak baik dari pemimpin partai tersebut, sehingga dapat menjamin keterbukaan dalam kehendak politik oleh partai politik. Namun proses perkembangan partai politik di Indonesia seperti menghadapi krisis, citra partai politik ditengah masyarakat hari ini dipertanyakan, ini dikarenakan ruang yang diberikan oleh reformasi untuk menjalankan fungsi-fungsi partai politik masih belum berjalan secara optimal. Partai-partai politik yang ada hari ini masih diragukan karena tidak adanya kemampuan dalam mengarahkan dan mewaliki kepentingan masyarakat sebagai wadah aspirasi yang kemudian menyalurkannya kepada pemerintahan, justru kader-kader partai politik tersebut menyalah gunakan kewenangan yang dimiliki ketika menduduki jabatan. Sehingga tindak pidana korupsi masih sering di temui pada pejabat publik yang lahir dari partai politik.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena memberikan dampak buruk terhadap sendi-sendi kehidupan. Kondisi sosial mengalami kehancuran dalam sistem perekonomian, demokrasi, politik, sosial dan pemerintahan. Terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan hari ini terdapat beberapa pejabat publik baik lembaga eksekutif maupun legislatif yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan data Laporan Tahunan KPK yang mencatat terjadinya kenaikan jumlah TPK (Tindak Pidana Korupsi) empat tahun terakhir yakni dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah tindak pidana kasus korupsi di Indonesia

Jenis Tindak Pidana	2014	2015	2016	2017
Tindak Pidana Korupsi	58 Kasus	57 Kasus	99 Kasus	121 Kasus

Sumber :Laporan tahunan KPK tahun 2017

Berdasarkan pada tabel 1.1, jumlah tindak pidana kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2014-2017 cenderung meningkat. Hal ini bisa dilihat pada laporan tahunan KPK tahun 2017 bahwa pada tahun 2014 terdapat 58 kasus tindak pidana korupsi, tahun 2015 57 kasus, tahun 2016 99 kasus dan 2017 terdapat 121 kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan laporan KPK tahun 2017 juga menyebutkan siapa saja yang menjadi subjek atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini bisa di lihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Subjek yang melakukan tindak pidana korupsi

No	Subjek yang melakukan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Kasus
1.	Swasta	90 Kasus
2.	Pejabat Eselon	38 Kasus
3.	Anggota DPR dan DPRD	71 Kasus
4.	Walikota	38 Kasus
5.	Gubernur	8 Kasus

Sumber : Laporan Tahunan KPK 2017

Berdasarkan pada tabel no 2 di atas, maka yang menjadi subjek atau orang yang terlibat kasus korupsi paling banyak adalah dari pihak swasta dengan jumlah 90 kasus, kemudian anggota DPR dan DPRD dengan jumlah 71 Kasus, Pejabat Eselon dengan jumlah 38 kasus, walikota dengan jumlah 38 kasus dan gubernur dengan jumlah 8 kasus.

Tahun 2018, KPK juga berhasil melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) 18 pejabat daerah yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi. Hal ini bisa dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 1.3 Daftar Pejabat Daerah OTT KPK Tahun 2018

No	Tgl OTT	Nama	Jabatan	Asal Partai
1.	4-01-2018	Abdul Latif	Bupati Hulu Sulawesi Tengah	Partai Berkarya
2.	3-02-2018	Nyono Suharti Wihandoko	Bupati Jombang	Partai Golkar
3.	11-02-2018	Marianus Sae	Bupati Ngada	Partai PDIP
4.	13-02-2018	Irmay Ayuminingsih	Bupati Subang	Partai Golkar
5.	14-02-2018	Mustafa	Bupati Lampung Tengah	Partai Nasdem
6.	27-02-2018	Adhiatma Dwi Putra	Walikota Kendari	Partai Amanat Nasional
7.	10-04-2018	Abu Bakar	Bupati Bandung Barat	Partai PDIP
8.	15-05-2018	Dirwan Mahmud	Bupati Bengkulu Selatan	Partai Perindo
9.	23-05-2018	Agus Feisal Hidayat	Bupati Buton Selatan	Partai PDIP
10.	4-06-2018	Tasdi	Bupati Purbalinggo	Partai PDIP
11.	6-06-2018	Syahri Mulyo	Bupati Tulung Agung	Partai PDIP

12.	6-06-2018	Samahudi Anwar	Walikota Blitar	Partai PDIP
13.	3-07-2018	Irwandi Yusuf	Gubernur Aceh	Partai Nangroe Aceh
14.	3-07-2018	Ahmadi	Bupati Bener Meriah	Partai Golkar
15.	17-07-2018	Pangonal Harapan	Bupati Labuhan Batu	Partai PDIP
16.	26-07-2018	Zainuddin Hasan	Bupati Lampung Selatan	Partai Amanat Nasional
17.	4-10-2018	Setiyono	Walikota Pasuruan	Partai Golkar
18.	15-10-2018	Neneng Hasanah Yasin	Bupati Bekasi	Partai Golkar

Sumber : www.idntimes.com.cdn.amproject.org

Berdasarkan Laporan Tahunan KPK tahun 2017 dan hasil OTT tahun 2018 tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah pejabat legislatif dan eksekutif dan diantara mereka merupakan anggota partai bahkan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai yang seharusnya menjadi tauladan bagi anggota partainya dan menjadi titik tonggak kaderisasi partai yang ditungganginya.

Proses kaderisasi partai politik menjadi instrument penting dalam pembentukan kualitas kader. Partai politik sebagai pilar demokrasi idealnya memiliki kewajiban seperti yang telah atur dalam UU.No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, salah satunya yaitu melakukan pendidikan politik dan menyalurkan

aspirasi politik anggotanya. Kaderisasi oleh partai politik terhadap anggotanya tidak dapat di hilangkan, karena mengingat bahwa kaderisasi menurut Partanto dan Bahri adalah nyawa dari organisasi (Insan Harapan Harahap, 2014:2). Kaderisasi yang baik akan menghasilkan demokrasi yang baik pula. Kaderisasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Begitupun sebaliknya kaderisasi yang buruk akan menghasilkan masyarakat yang apatis bahkan benci terhadap politik. Tiap orang tahu betapa terpuji bagi seorang pemimpin untuk memelihara kesetiaan yang baik dan hidup dengan integritas, bukan dengan kelihaihan (Niccolo Machiavelli, 2015:151).

Kaderisasi yang membentuk kepemimpinan orang-orang yang mendapat mandat dari partai politik untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang adapun dipertanyakan, informasi mengenai calon pemimpin tersebut sangat terbatas karena pola tertutup ini, tidak banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana visi dan misi dan kualitas orang tersebut, selain kualitas pribadi calon anggota legislatif ataupun pejabat eksekutif yang sangat minim informasi, praktek kaderisasi dengan pola tertutup seolah membuka pintu tindak *money politic* di antara elit partai dengan orang-orang yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif ataupun eksekutif, Lord Acton dalam Miriam Budiardjo menyatakan bahwa "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (¹Miriam budiardjo, 2013:175). Praktek ini menjadi awal terjadinya tindak pidana korupsi oleh para anggota dewan yang menjabat di lembaga legislatif maupun pejabat publik di lembaga eksekutif untuk menutupi *cost politic* yang terlalu besar.

Menjelang pemilu pada tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 16 partai peserta pemilu melalui *website* resminya, adapun partai-partai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Daftar Partai Peserta Pemilu 2019

No	Nama Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai Nasional demokrat (NASDEM)
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang (PBB)
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Sumber :KPU.go.id, 2018

Diantara 16 partai tersebut terdapat beberapa partai baru yang menjadi peserta dalam Pemilihan Umum pada tahun 2019, yaitu Partai Berkarya, Partai Garuda, Perindo dan PSI, namun sangat disayangkan aktivitas kaderisasi oleh

partai politik baru peserta pemilu ini belum dapat terlihat proses dan hasilnya dalam sebuah laporan yang disajikan kepada publik.

Ditengah-tengah persiapan pesta demokrasi 2019 , sampai saat ini ke 16 partai politik yang bertugas untuk melakukan kaderisasi tersebut belum melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Praktek kaderisasi terkesan hanya menjadi suatu hal simbolik dan tidak serius dipraktikkan oleh sebagian Partai Politik yang berkontestasi pada setiap Pemilu yang berlangsung di Indonesia. Kaderisasi oleh partai politik yang terjadi di Indonesia mengalami proses yang kurang kondusif dalam proses perkembangan demokrasi di Indonesia, partai politik terlihat memangkas aktivitas kaderisasi dengan mengutamakan calon yang diusung dalam pemilihan umum dari kalangan “artis” atau orang-orang yang tidak kompeten dibidangnya namun memiliki popularitas tinggi sehingga di rekrut secara instan karena dapat mendulang suara untuk kekuasaan dan kekayaan.

Banyaknya pejabat publik yang tertangkap tangan oleh KPK ini mengindikasikan bahwa proses kaderisasi oleh partai politik di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Proses Kaderisasi yang tidak berjalan dengan baik ini juga disebabkan proses kaderisasi oleh partai politik di daerah yang juga rendah termasuk di Provinsi Lampung . Menjelang pesta demokrasi , provinsi Lampung tercatat pada tahun 2018 diperparah dengan ditangkapnya 2 pejabat daerah di provinsi Lampung dalam kurun waktu 1 tahun atas penyalahgunaan wewenang dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, salah satunya yaitu kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan

oleh Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hassan dari Partai Amanat Nasional pada tanggal 2 juli 2018.

KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Dia diduga menyamarkan uang dari hasil korupsi menjadi sejumlah aset. "KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga dilakukan oleh tersangka ZH (Zainudin Hasan)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018).

Febri mengatakan Zainudin diduga membelanjakan uang yang diduga berasal dari suap.Zainudin disebut menggunakan uang itu untuk membeli aset berupa tanah, bangunan, ataupun kendaraan."ZH melalui ABN (Agus Bhakti Nugroho/anggota DPRD Lampung) membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga, pihak lain, atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan ZH," ucapnya.Dia disangkakan melanggar Pasal 3 UU 8/2010 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Zainudin sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap sebelumnya. Ada aliran uang Rp 57 miliar yang diduga diterima oleh Zainudin sepanjang 2016-2018 dari sejumlah proyek (<https://news.detik.com>). Berdasarkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan yaitu Zainuddin Hasan adalah pejabat daerah yang merupakan anggota partai politik. Pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut yang notabene sebagai Ketua DPW PAN seharusnya menjadi titik tonggak pengkaderan partai yang justru terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pola Kaderisasi Partai Politik di Provinsi Lampung pada DPW PAN Provinsi Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah bagaimana pola kaderisasi DPW PAN Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kaderisasi DPW PAN Provinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pemerintahan khususnya dalam mata kuliah Partai Politik dan demokrasi.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan perkembangan kaderisasi partai politik di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kaderisasi

1. Pengertian Kader dan Kaderisasi

Kader diartikan sebagai orang yang diharapkan akan memegang jabatan atau pekerjaan penting di pemerintahan, partai, dan lain-lain (Verthizal Rivai Zainal, 2017:96). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kader merupakan orang yang telah ditempa atau dipersiapkan secara terus menerus di dalam suatu organisasi sehingga mampu mengemban amanah di posisi strategis sebagai pejabat politik di pemerintahan, wakil rakyat, ataupun tulang punggung organisasi tersebut.

Insan Harahap (2016) menjelaskan bahwa proses perkaderan adalah proses atau perbuatan mendidik dalam rangka mempersiapkan seseorang menjadi kader. Kaderisasi berasal dari istilah militer yakni *carde* yang berarti perjuangan, sehingga pada saat itu didefinisikan sebagai sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari suatu partai atau organisasi (Partanto dan Bahri,1994). Maka dengan kata lain kaderisasi adalah proses penempatan kader secara

terus menerus guna menjalankan estapet kepemimpinan yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan visi misi organisasi atau partai politik.

2. Prinsip-Prinsip Kaderisasi

KPK dan LIPI (2016) menjelaskan bahwa kaderisasi akan berjalan dengan baik apabila dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut :

a. Terbuka

Prinsip terbuka mengandung arti bahwa setiap anggota partai politik maupun sayap partai memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training*) dan kegiatan-kegiatan lain dalam proses kaderisasi. Hal ini juga berkaitan dengan perlunya sistem persaingan yang sehat dan transparan untuk memberikan keadilan bagi setiap anggota partai politik yang terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme ,dengan demikian diharapkan dapat memunculkan sosok pemimpin yang berkualitas dan berintegritas sehingga dapat menjaga nama baik organisasi.

b. Non-Diskriminatif

Partai politik memberi akses kaderisasi tanpa membedakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan), gender.Prinsip ini untuk meminimalisir oligarki partai politik dalam kandidasi kontestasi

legislatif maupun eksekutif. Sehingga setiap kader yang ada memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh promosi dan karir politik.

c. Berjenjang

Kaderisasi partai politik harus didasarkan pada pelapisan bertahap, bertingkat atau pyramidal. Prinsip ini sebagai akibat dari pentahapan materi kaderisasi dan pentahapan karir organisasi .dalam pentahapan materi kaderisasi parpol memastikan bahwa setiap kader memiliki kapasitas yang sama karena melalui proses kaderisasi yang sama, sementara untuk pentahapan akhir organisasi tampak pada persyaratan tingkat kaderisasi tertentu yang harus diikuti ketua, sekjend dan sebagainya di setiap tingkatan. Perjenjangan ini biasanya disusun dengan pejenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjut atau dengan istilah lainnya dengan konsep yang sama. Prinsip berjenjang ini dibutuhkan karena perlunya memenuhi indikator minimal kapasitas pengetahuan seluruh kader sebagai pondasi di setiap lapisan struktur organisasi, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

3. Tujuan Kaderisasi

Menurut KPK dan LIPI dalam panduan rekrutmen dan kaderisasi parpol ideal di Indonesia (2016), kaderisasi memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai dan ideologi , visi dan misi yang diperjuangkan oleh partai. Ideologi adalah susunan gagasan yang terorganisir sebagai pedoman bagi kelompok masyarakat atau Negara. Artinya kaderisasi memberikan pemahaman bagi anggota parpol tentang nilai-nilai apa yang harus ia perjuangkan dalam partainya sesuai ideologi dan visi misi partai. Contoh ideologi: pancasila, liberalism, sosialisme, konservatisme , islamisme dll.
- b. Menumbuhkan Militansi, artinya kaderisasi bertujuan menumbuhkan loyalitas kader dalam partai. Salah satu cara menumbuhkan militansi adalah dengan penanaman ideologi, hal ini menjadi faktor kunci yang disajikan dalam aktivitas kaderisasi.
- c. Upaya meningkatkan kapasitas kader. Kapasitas kader yang dimaksud adalah dalam hal tata kelola partai politik, seperti peningkatan kapasitas kader yang akan menduduki jabatan-jabatan publik seperti DPR/DPRD dan birokrasi pemerintahan. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana keterampilan yang harus dimiliki oleh anggota partai politik yang menduduki posisi-posisi strategis dalam institusi-institusi publik.

Dari berbagai tujuan kaderisasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kaderisasi diterapkan untuk memberikan pemahaman, meningkatkan militansi dan kapasitas, serta keterampilan kader melalui partai politik guna menghasilkan kader yang berkualitas demi keberlangsungan roda organisasi parpol itu sendiri dan institusi-institusi publik.

B. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Undang-undang No.2 tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sedangkan Menurut Miriam Budiardjo (2008)

“Partai Politik merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama serta memiliki tujuan memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum.”

Pendapat Carl J Friedrich dalam Miriam Budiardjo (2008:404) adalah :

“Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil secara materil.”

Dari berbagai pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok orang dengan orientasi dan visi misi yang sama serta memiliki tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional.

2. Fungsi Partai Politik

Secara sederhana partai politik memiliki fungsi yakni mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu

Firmanzah dalam Dr.Mahadam Labolo dan Teguh Ilham S.Stp (2015:16) mengungkapkan bahwa secara garis besar partai politik memiliki dua fungsi yakni fungsi internal dan eksternal.

- a. Fungsi internal : partai politik berfungsi atau berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan dan pengkaderan bagi anggota-anggota partai politik demi kelanggengan ideology polituik yang menjadi latar belakang pendidikan politik tersebut.
- b. Fungsi eksternal : partai politik berfungsi dalam ruang lingkup lebih luas yakni untuk masyarakat, bangsa dan Negara, dimana partai politik mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan keadaan masyarakat menjadi lebih baik.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (2007:117-119) ada 7 fungsi partai politik yaitu :

1. Sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat begitupun sebaliknya.
2. Pemadu kepentingan. Partai politik menjadi penggabung kepentingan atau aspirasi berbagai kelompok yang kemudian dijadikan menjadi satu untuk diusulkan kepada pemerintah.
3. Sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang sedang berlangsung.

4. Sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
5. Pengendali konflik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog atau bermusyawarah dengan pihak-pihak yang berkonflik.
6. Partisipasi politik. Partai politik berfungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.
7. Sebagai alat kontrol politik. Kontrol politik merupakan kegiatan untuk mengoreksi pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam proses kontrol politik, partai politik harus bersifat terbuka (diketahui dan diterima oleh masyarakat), mendidik, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang.

Dari berbagai fungsi partai politik di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, partisipasi dan alat kontrol politik.

3. Tipologi Partai Politik

Menurut Ali Safaat dalam Muhadam Labolo dan Ilham Teguh (2014:27)

tipologi partai politik dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan asas dan orientasi, berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya dan berdasarkan kemungkinan memenangkan pemilu, adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Berdasarkan Asas dan Orientasi

Menurut Ramlan Surbakti (1992) berdasarkan asas orientasinya partai politik dibedakan atas tiga yaitu :

1. Partai Politik Pragmatis, merupakan partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terlalu terikat kaku pada doktrin ideology tertentu. Asas dan orientasinya menyesuaikan dengan perubahan dan situasi politik. Partai pragmatis biasanya terdapat dalam sistem dua partai yang berkompetisi secara stabil Contoh partai politik pragmatis ialah partai demokrat dan partai Republik di Amerika Serikat.
2. Partai Politik Doktriner, merupakan partai yang memiliki program dan kegiatan konkret yang berdasarkan pada suatu ideologi tertentu. Partai politik ini memiliki bentuk yang terorganisir dan ketat. Contoh dari partai politik doktriner ialah partai komunis.
3. Partai Politik Kepentingan, merupakan partai politik yang dibentuk atas dasar kepentingan tertentu seperti kepentingan agama, etnis, perkajaan (petani, buruh dll) dan kelompok aktivis lingkungan

hidup, dan lain-lain. Contoh partai politik kepentingan seperti Partai Hijau di Jerman dan Partai Buruh Australia.

b. Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggotanya

Berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaannya partai politik dibagi atas 2 yaitu :

1. Partai Massa, merupakan partai dengan jumlah anggota dan pendukung yang banyak. Banyaknya basis massa pada partai ini disebabkan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat berada dalam lingkungan sebuah partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang bersifat umum.
2. Partai Kader , merupakan partai yang mengandalkan kader-kadernya untuk loyal dan disiplin, jumlah partai kader tidak sebanyak partai massa. Para anggota partai kader diisi oleh kalangan elit yang profesional dalam bidang-bidangnya.
3. Partai Catch All, merupakan partai tidak jauh berbeda dengan partai massa namun orientasinya berbeda dengan partai massa. Partai ini menyatakan partainya mewakili kepentingan secara keseluruhan dengan orientasi hanya untuk memenangkan pemilu. Pada umumnya partai di Indonesia sering meonjolkan dirinya sebagai partai Catch-All. Hal ini dikarenakan dalam sistem pemilu di Indonesia kebutuhan untuk menduduki kursi eksekutif dan legislatif tidak hanya yang berkualitas tetapi juga memiliki dukungan massa yang

massif. Oleh karena itu di Indonesia sering terlihat artis/public figure yang mencalonkan anggota legislatif maupun eksekutif.

c. Berdasarkan Kemungkinan Memenangkan Pemilu

Labolo Muhadam dan Ilham teguh (2014:31) menjelaskan bahwa berdasarkan kemungkinan memenangkan pemilu partai ini dibagi atas dua yaitu partai mayoritas dan minoritas sebagai berikut :

1. Partai Mayoritas, partai mayoritas merupakan partai yang secara rasional memiliki prospek untuk memenangkan pemilihan umum. Biasanya partai ini menggabungkan program dan dukungan massa.
2. Partai Minoritas, merupakan partai yang tidak memiliki potensi untuk memperoleh suara yang signifikan.

C. Kaderisasi Partai Politik

1. Partai Kader

Pengertian partai kader menurut Ari Darmastuti dan Tabah Maryanah (2004:12) adalah :

“Partai kader, yaitu partai yang mengandalkan pada kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan sangat ketat, melalui pengkaderan yang berjenjang dan intensif, serta penengakan disiplin partai yang konsisten tanpa pandang bulu. Struktur organisasi hirarki sehingga jalur perintah dan tanggung jawab dangat jelas, karenanya sangat elitis.”

Sementara menurut Ichlasun Amal (1996:pengantar):

“Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dengan keanggotaan berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya ideology yang dianut partai ini adalah Konservatisme Ekstrem atau maksimal Reformis Moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Sehingga partai kader lebih tampak sebagai sekelompok informal dari pada organisasi yang didasarkan disiplin.”

Berdasarkan pengertian dari dua ahli diatas dapat disimpulkan bahwa partai kader ialah partai yang mengandalkan kualitas anggotanya dengan sistem penjangkaran yang cukup ketat, ekstrem dan reformis moderat, biasanya keanggotaan terdiri dari kalangan menengah keatas

2. Kriteria Kader

As Hornby (2011) mengatakan bahwa *“Cadre is small group of people who are specially chosen and trained a particular purpose.* (kader adalah sekelompok orang yang dipilih dan dilatih secara khusus untuk tujuan tertentu). Seseorang dapat disebut sebagai kader (setelah menjadi anggota partai) apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Anggota yang telah mengikuti jenjang kaderisasi, ditetapkan sebagai kader, dan memiliki kewajiban mengikuti jenjang kaderisasi yang telah ditetapkan oleh partai.
2. Setiap anggota partai politik yang memiliki nilai-nilai integritas, akuntabilitas dan moralitas dapat dipertimbangkan untuk menjadi kader partai politik.

3. Setiap anggota partai politik yang telah menjadi anggota partai politik minimal 6 (enam) bulan, diwajibkan untuk mengikuti perkaderan sesuai dengan jenjang pengkaderan yang ditetapkan oleh partai politik.
4. Penentuan sebagai kader partai dilakukan oleh pengurus harian partai melalui rapat pengurus setelah yang bersangkutan mengikuti jenjang pengkaderan, setidaknya jenjang pengkaderan tingkat awal pertama atau sesuai dengan kesepakatan partai yang dituangkan dalam AD-ART partai.
5. Memperhatikan ketentuan setidaknya 30% perempuan dalam perekrutan sebagai kader.

Berikut perbedaan kriteria kader antara partai massa dan partai kader :

Tabel 2.1 Perbedaan Kriteria Kader antara Partai Massa dan Partai Kader

Tipe Partai	Kriteria Kader
Partai Massa	<ul style="list-style-type: none"> • Kader memiliki kesamaan ideologi dengan ideologi partai • Kader memiliki kelekatan sejarah sosio-kultural dengan basis sosio-kultural pendukung partai • Kader harus dihasilkan melalui proses pengkaderan internal partai • Kader adalah simpul mobilisasi pendukung (simpul massa)
Partai Kader	<ul style="list-style-type: none"> • Kader memiliki kesamaan ideology dengan ideologi partai meskipun mungkin dalam batas

Tipe Partai	Kriteria Kader
	<p>yang cair</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kader bisa dihasilkan melalui proses pengkaderan internal partai namun bisa juga tidak • Kader memiliki kualitas untuk merancang kebijakan partai dan memiliki kapasitas menduduki jabatan-jabatan public. • Kader tidak mesti menjadi simpul massa/mobilitas massa

Sumber : data olahan yang diperoleh dari buku Oxford Advanced Learner's Dictionary 2011

3. Jenjang Pengkaderan Ideal

Jenjang pengkaderan membagi materi dan keterampilan apa saja yang dimiliki oleh peserta kaderisasi baik terkait peran yang akan diambil maupun mandate-mandat yang diberikan oleh parpol. Secara general jenjang kaderisasi dibagi atas 3 yaitu :

a. Kaderisasi Tingkat Pertama

Kaderisasi tingkat pertama menekankan pada membangun budaya dan konsolidasi partai politik serta membekali anggota partai mengenai

keterampilan manajerial dan tata kelola partai yang sederhana. Sehingga materi-materi yang disampaikan sebagai berikut :

- a) Dasar-dasar ideologi dan politik
- b) Sejarah partai politik
- c) AD-ART
- d) Tata kelola partai politik dan pemerintah di kabupaten/kota
- e) Dinamika dan isu-isu kontemporer yang berkembang di tingkat kabupaten/kota
- f) Hubungan antara partai politik dan pemerintah di tingkat kabupaten/kota
- g) Keuangan partai politik dan keuangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota
- h) Masalah kepemimpinan dan tingkat lokal
- i) Masalah kepemiluan di tingkat lokal beserta strategi pemenangannya
- j) Hubungan dengan media massa
- k) dll

b. Kaderisasi Tingkat Madya

Kaderisasi tingkat madya dirancang untuk menghasilkan pengurus partai tingkat provinsi dan atau anggota DPRD atau kepala daerah tingkat provinsi, sehingga pada tingkat ini para kader diharapkan mampu menguasai :

1. Tata kelola partai politik di tingkat provinsi
2. Dinamika dan isu-isu kontemporer yang berkembang di tingkat provinsi
3. *Problem solving skill* terkait dengan kebijakan di tingkat provinsi
4. Proses pembuatan kebijakan di tingkat provinsi
5. Hubungan antar partai politik dan pemerintah di tingkat provinsi
6. Keuangan partai politik dan keuangan pemerintah di tingkat provinsi
7. Masalah kepemimpinan
8. Hubungan dengan media massa, dan
9. Keterampilan lobiying

c. Kaderisasi Tingkat Utama

Kaderisasi tingkat utama diperuntukan bagi calon pengurus partai politik anggota legislatif tingkat pusat serta calon presiden dan wakil presiden. Pada kaderisasi tingkat ini selain dituntut untuk memahami masalah internalisasi nilai-nilai partai, tetapi juga para kader harus mampu memahami pengetahuan akan masalah-masalah global, pemahaman kebijakantingkat nasional, lingkungan strategis internasional serta hukum, ekonomi, pemerintahan dan hubungan internasional. Adapun materi-materi yang harus dipahami kader antara lain :

1. Tata kelola partai politik di tingkat nasional
2. Dinamika dan isu-isu kontemporer di tingkat nasional
3. *Problem solving skill* terkait dengan kebijakan di nasional
4. Proses pembuatan kebijakan nasional

5. Hubungan antara partai politik dan pemerintah di tingkat nasional dan global
6. Keuangan partai politik dan keuangan pemerintah daerah di nasional dan global
7. Masalah kepemimpinan dan kemampuan komunikasi interpersonal
8. Masalah kepemiluan di tingkat nasional beserta strategi pemenangannya
9. Hubungan dengan media massa
10. Keterampilan negosiasi dan lobiyying
11. Pemahaman lingkungan strategis internasional
12. Pemahaman mengenai sistem ekonomi, hukum, pemerintahan, serta hubungan internasional dll

4. Pola Kaderisasi Partai Politik

Partai politik memiliki kepentingan untuk memperbanyak keanggotaannya, dengan demikian partai politik akan berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Hal ini yang mendasari berdirinya organisasi-organisasi masa sayap partai yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi ataupun cara lain (miriam Budiardjo, 2013:409).

Vernanda Samuel (2017:37) menjelaskan kaderisasi terkait dengan fungsi antara lain :

1. Melakukan rekrutmen anggota baru, penanaman awal nilai organisasi agar anggota baru bisa paham dan bergerak menuju tujuan organisasi.
2. Menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota
Membina anggota dalam setiap pergerakannya. Menjaga anggota dalam nilai-nilai organisasi dan memastikan anggota tersebut masih sepaham dan satu tujuan. Mengembangkan skill dan *knowledge* anggota agar semakin kontributif.
3. Menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif kaderisasi akan gagal ketika potensi anggota mati dan anggota tidak terberdayakan.
4. Mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi, kaderisasi bisa menjadi elevator organisasi terhadap anggota. Sejauh mana nilai-nilai itu diterima anggota, bagaimana dampaknya, dan sebagainya.

Veithzal Rivai Zainal (2017:96) menjelaskan bahwa kaderisasi sebagai proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader.

Dalam pelaksanaannya proses kaderisasi terdiri dari dua macam, yaitu :

a. Kaderisasi Informal

Kaderisasi Informal adalah proses yang dilakan dengan tidak terencana, ini proses ini dapat berjalan ketika semua pihak secara bersama-sama aktif

mengerjakan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat guna menjadi dan menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

b. Kaderisasi Formal

Kaderisasi formal adalah usaha mempersiapkan seseorang sebagai calon pemimpin dilakukan secara berencana, teratur dan tertib, sistematis, terarah dan disengaja. Usaha itu bahkan dapat diselenggarakan secara melembaga, sehingga semakin jelas sifat formalitasnya. Untuk itu proses kaderisasi mengikuti suatu kurikulum yang harus dilaksanakan selama jangka waktu tertentu dan berbasis bahan-bahan teoritis dan praktik tentang kepemimpinan serta bahan-bahan lain pendukungnya.

Tim kaderisasi FSBKU, Hapsari,SPP,PO dan SRB menjelaskan bahwa pola kaderisasi adalah bagaimana proses pilih, didik dan ikat dan pengawalan berjalan dalam organisasi, berikut penjabarannya :

a. Proses Pilih

Keberhasilan tindakan memilih sangat tergantung pada kemampuan organisasi dalam menerjemahkan ideologi dan kebijakan politiknya.

1. Pendekatan personal, yakni pendekatan dan relasi personal yang dimiliki pimpinan atau pengurus organisasi. Pendekatan ini merupakan proses awal rekrutmen sebagai satu cara untuk menarik individu agar mau berserikat atau berorganisasi

2. Pendekatan organisasional, yakni individu atau tim yang berperan melakukan pencarian dan pemilihan dengan mengacu pada kebijakan dan agenda-agenda organisasi. Proses memilih kader dilakukan dengan penetapan kriteria secara eksplisit sebagai kebijakan organisasi, pendekatan ini lebih terencana dan melibatkan struktur penanganan yang lebih jelas.

b. Proses Didik

Proses didik yang dilakukan organisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas kader baik melalui pendidikan terstruktur ataupun tidak terstruktur.

a. Pendidikan secara terstruktur

Pimpinan dan jajaran pengurus organisasi bertanggung jawab sekaligus berkepentingan untuk merancang model pendidikan sebagai bagian dari sistem kerja organisasi. Proses ini dikenal dengan sistem perjenjangan dimana tujuannya untuk membangun potensi standar sesuai kebutuhan agenda perjuangan organisasi.

b. Pendidikan secara tidak terstruktur

Proses pendidikan ini memberikan ruang bagi para kader mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya, umumnya dilakukan melalui penugasan-penugasan tertentu. Tidak jarang pendidikan secara

tidak terstruktur dapat berbentuk ujian, hukuman atau sanksi yang diberikan organisasi kepada kader.

c. Proses Ikat

Proses ikat merupakan upaya organisasi untuk membuat seorang kader mengembangkan keyakinan, cita-cita dan agenda-agenda organisasi. Kader-kader yang dianggap potensial akan ditempatkan dalam struktur organisasi. Bentuk lain dari penugasan adalah organisasi memberikan mandat secara resmi kepada kader untuk masuk dalam wilayah politik dan sejumlah posisi-posisi strategis di lembaga pemerintahan. Oleh karena itu ketika kader menduduki posisi tersebut harus bekerja untuk kepentingan anggota dan kebijakan yang diambil berdasarkan hasil pengaruh organisasi yakni kebijakan pemerintahan adalah untuk membantu memperjuangkan keadilan sebagaimana yang dirumuskan sebagai perjuangan organisasi. Selain jabatan fungsional strategis dalam pemerintahan, hal lain yang dapat mengikat kader dengan organisasi adalah hubungan emosional yang muncul antar individu yang ada dalam organisasi. Ikatan menguat setelah organisasi mendukung dan membantu perjuangan kader secara penuh.

d. Proses Pengawasan

Proses pengawasan yang terjadi di organisasi dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Kongres, pertemuan anggota secara berkala pada berbagai jenjang dalam organisasi dan pertemuan-pertemuan

pengurus menjadi media untuk mengawal. Karena pada ruang-ruang ini para kader akan diminta pertanggungjawabannya. Pengawasan secara tidak terstruktur dilakukan melalui relasi-relasi personal antar pimpinan, mentor dan orang-orang yang memiliki pengaruh ideologis.

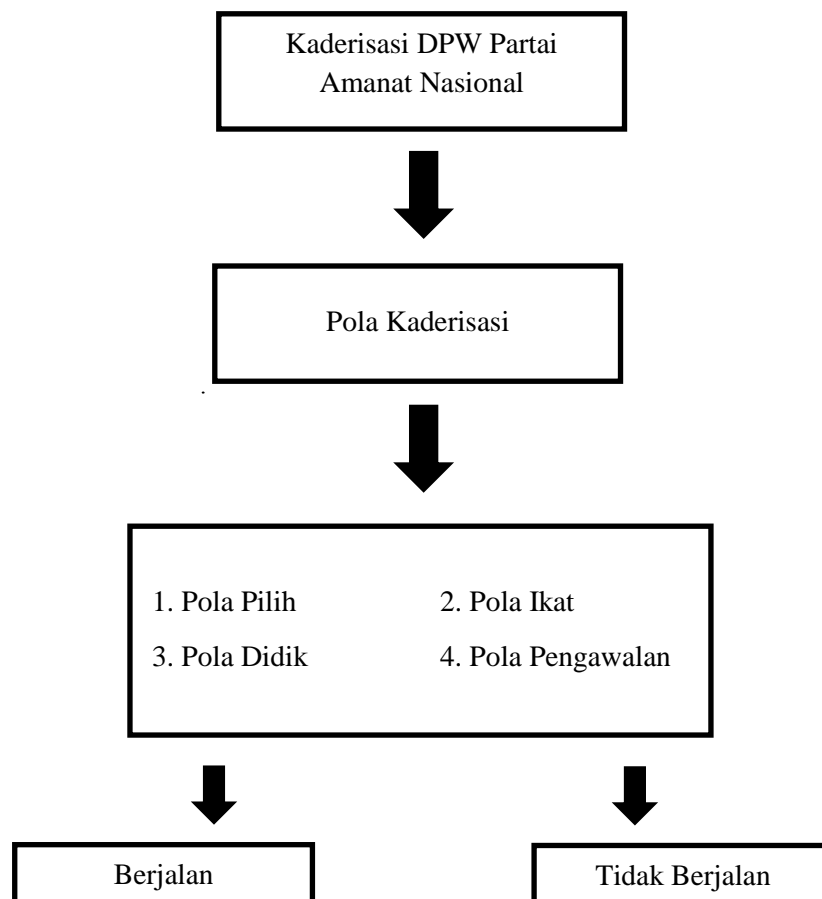
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang coba dibangun peneliti ialah berawal dari fenomena makin meningkatnya daftar pejabat publik di Indonesia yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia khususnya di provinsi Lampung. Dimana kebanyakan pejabat publik tersebut merupakan kader aktif sebuah partai politik dan pemenangnya sebagai pejabat publik juga diusung oleh partai politiknya. Yang menarik bagi peneliti adalah pada tahun 2018 adalah seorang pejabat publik di Provinsi Lampung tertangkap KPK dalam kasus penyalahgunaan wewenang berupa suap, yakni Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hassan yang notabene menjabat sebagai Ketua DPW di masing-masing partainya. Citra buruk politikus akan mencederai keberlangsungan demokrasi di Indonesia khususnya provinsi Lampung.

Peran partai politik menjadi sangat penting dalam membentuk kualitas para calon pemimpin bangsa. Pembentukan kualitas para kader tergantung dari bagaimana penanaman ideologi, nilai-nilai, visi-misi, serta praktik menduduki jabatan politis sebagai seorang kader. Secara ideal kaderisasi terdiri dari proses pilih, didik, ikat dan pengawasan yang proporsional dan diimplementasikan secara baik. Ketika terjadi sesuatu *output* yang buruk maka

pertanyaannya adalah apakah terdapat suatu kesalahan dari setiap proses kaderisasi partai tersebut atau mungkin ada variabel lain yang mempengaruhinya. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan terkait pola kaderisasi sebuah partai politik khususnya DPW PAN Provinsi Lampung, serta mampu memberi solusi dari setiap permasalahan pengkaderan partai politik.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

Suatu penelitian bertujuan untuk memahami suatu permasalahan sehingga dapat dikembangkan kebenarannya, maka diperlukan metode dalam penelitian tersebut, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam melakukan penelitian sosial, seorang peneliti dapat menggunakan beberapa metode guna mempermudah memecahkan persoalan yang ada.

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi (Lexy J Moelong, 2007:4). Didukung oleh Moh Nazir (2005:4), menyatakan bahwa:

“Metode deskriptif sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan analisis yang dilakukan secara kritis terhadap fakta yang ditemukan.”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena untuk mengetahui bagaimana Pola Kaderisasi Partai Politik di Provinsi Lampung khususnya pada DPW Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga pengambilan informan dilakukan secara *purposive* yang ditentukan secara *snowball*. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) data. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan hasil wawancara mendalam terhadap informan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terkait pola kaderisasi partai politik pada DPW PAN Provinsi Lampung.

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Penelitian ini bisa juga dikatakan sebagai kelanjutan dari penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif telah menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian ini mengungkapkan secara lebih detail. Penelitian ini diidentikkan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan “bagaimana” dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptid adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola. (Bambang Prasetyo dan Lina Jannah, 2005: 42-43).

Penelitian deskriptif mampu menyajikan gambaran secara detail dari sebuah situasi dan atau *social setting*, pada pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan dari lapangan,

foto-foto, dokumen pribadi, nota, dan catatan lain-lain. Atas alasan itulah dipilihnya pendekatan deskriptif kualitatif.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambar, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pada umumnya persamaan sifat dari segala bentuk penelitian kualitatif ialah menuturkan dan menafsirkan data, yang pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data yang ada, tetapi meliputi analisa interpretasi tentang arti data itu (Uhar Suharsaputra, 2012:186).

B. Fokus Penelitian

Menemukan fokus adalah langkah pertama dalam analisis. Proses tersebut dilakukan pada awal memulai penelitian, untuk memberikan arah dalam upaya menemukan fokus. Peneliti menggunakan pertanyaan seperti jenis data apakah yang dianalisis, bagaimana peneliti memberikan ciri pada data itu, apakah yang menjadi tujuan analisis peneliti, mengapa peneliti memilih data itu, bagaimana data itu mewakili atau merupakan perkecualian, siapa yang ingin mengetahui dan apa yang mereka ingin ketahui. Jadi peneliti bebas menggunakannya dan didasarkan pada perhatiannya yang diprioritaskan. Selain itu, peneliti dapat pula memanfaatkan sumber-sumber seperti pengalaman pribadi, budaya umum, keputusan akademis untuk membantu mencari dan menemukan fokus (Lexy J. Moleong, 2006:291).

Suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong. Sewajarnya peneliti membatasi masalahnya dengan fokus, fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan lainnya. Implikasinya apabila peneliti merasakan adanya masalah, maka langkah yang dilakukan adalah mendalami kepustakaan yang relevan sebelum terjun ke lapangan.

Suatu penelitian sangat penting adanya fokus penelitian karena fokus penelitian dapat membatasi studi yang akan diteliti. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Penerapan fokus penelitian berfungsi dalam memenuhi kriteria-kriteria, inklusi-eksklusi, atau masukan-masukannya, menjelaskan informasi yang diperoleh di lapangan. Adanya fokus penelitian, diharapkan dapat menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pola kaderisasi yang dijalankan oleh suatu partai politik dapat ditinjau dari bagaimana proses yang berjalan didalam partai tersebut. Karena pola kaderisasi partai politik pada hakikatnya dapat diartikan sebagai *roadmap* yang telah diciptakan oleh partai politik untuk dapat melakukan pembinaan kepada anggotanya sehingga dapat menjadi kader yang memiliki kualitas yang baik serta memiliki kesesuaian perjuangan dengan partai tersebut.

Fokus penelitian ini meminjam pola kaderisasi menurut tim Kaderisasi FSBKU yaitu Pola kaderisasi mulai dari tahap pilih, didik, ikat sampai pengawalan, sehingga jika di fokuskan pada penelitian ini menjadi :

1. Proses Pilih Kader Partai Politik.
2. Proses Didik Kader Partai Politik.
3. Proses Ikat Kader Partai Politik.
4. dan Proses Pengawasan Kader Partai Politik.

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pola kaderisasi DPW PAN Provinsi Lampung, dalam hal proses pilih, proses didik dan proses ikat serta proses pengawasan para kader partainya di Provinsi Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana obyek penelitian dapat ditemukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Kantor DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai PAN di provinsi Lampung yang masing-masing beralamat di Jl. Griya Kencana Blok F-8 RT. 03 LK.1, Kelurahan Way Halim Permai, Kec. Way Halim Bandar Lampung.

D. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini mencakup :

1. Data Primer

Menurut Bungin (2004:122), data primer adalah data yang langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Dalam penelitian ini data primer dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh langsung dilapangan baik melalui pengamatan langsung maupun pertanyaan langsung yang digunakan peneliti kepada informan yakni pengurus DPW Partai PAN Provinsi Lampung yang memiliki kewenangan, kewajiban, perhatian dan mau memberikan informasi mengenai pola kaderisasi partai.

2. Data Sekunder

Menurut Bungin (2004:122), sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung selain di lokasi penelitian, yang dapat dilihat dari literatur-literatur serta dokumen-dokumen lain yang mendukung dalam penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan di Kantor DPW Partai PAN Provinsi Lampung. Dokumen yang dijadikan sebagai data adalah AD/ART Partai PAN 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpul data tersebut berfungsi saling melengkapi data-data yang dibutuhkan. Untuk mengumpulkan data dan informasi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi, seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (2011:11) yaitu: “wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk menjawab secara lisan pula, ciri utamawawancara adalah langsung bertatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi (*interviewer/information hunter*) dengan sumber informasi (*interviewee*) Wawancara jenis ini tidak dilaksanakan dengan struktur yang tepat tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan sehingga informasi yang didapatkan cukup akurat, sehingga mampu mendapatkan data lebih mendalam akan kejujuran informan dalam memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, berupa arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah serta data tertulis lainnya yang mendukung penelitian ini. Untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen pada lokasi penelitian,

dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen yang dianggap perlu dan relevan dengan penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah cara yang digunakan dalam pengumpulan data setelah peneliti melakukan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, peneliti menjadi lebih memahami tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tahap Editing

Menurut Bungin (2008:165) editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti menghimpun data dari lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahannya (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan dimana transkrip wawancara yang didapat diperiksa kembali apakah masih terdapat kesalahan didalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif.

2. Interpretasi

Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari responden dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sofian Effendi dan Chris Manning dalam Singarimbun dan Effendi (1995:263) analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

Prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A Michael Huberman (Basrowi dan Suwandi, 2008:209) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan : (1) reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan. Pemusatan perhatian, mengabstraksikan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Rangkuman informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada analisis data kualitatif adalah bentuk teks naratis (peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara berurutan). Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat, dikumpulkan untuk diambil kesimpulan-kesimpulan, sehingga bisa disajikan dalam narasi deskriptif

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

H. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2000:173), untuk menetapkan keabsahan (truth warthines) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu salah satunya adalah derajat kepercayaan (credibility) dengan teknik tringulasi. Tringulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

data itu untuk keperluan pengecekan atau verifikasi sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh. Adapun yang dipakai penulis adalah triangulasi dengan sumber, artinya membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada penelitian kualitatif hal itu dapat dicapai dengan jalan :

- a. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. membandingkan apa yang dikatakan orang di umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
- e. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

I. Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih orang-orang tertentu karena dianggap mewakili informasi. informan dalam penelitian ini adalah mereka yang memenuhi persyaratan dalam penelitian, yaitu mereka yang masih mengerti dan paham, serta memiliki pengetahuan tentang pola kaderisasi PAN, sehingga dari informasi yang diperoleh dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data mengenai proses-proses yang berjalan dalam kaderisasi DPW PAN Provinsi Lampung. Informan yang dipilih peneliti adalah:

1. Pengurus DPW Partai PAN Provinsi Lampung
2. Kader DPW Partai PAN Provinsi Lampung

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Profil Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri. Partai politik ini menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat.

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) tidak lepas dari faktor-faktor pendukung dibelakangnya, adapun faktor-faktor pendukung tersebut yaitu:

1. Semangat Reformasi

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh Amien Rais bersama para Mahasiswa telah berhasil menurunkan Soeharto dari kekuasaannya. Kekuasaan yang cenderung otoriter memberangus kelompok-kelompok kritis telah digerus oleh gelombang untuk tuntutan menciptakan Indonesia

Baru yang demokratis dan bersih dari praktik KKN. Amien Rais harus bertanggung jawab dan meneruskan reformasi, sebab sering terjadi transisi menuju demokrasi bisa mengalami buntu, bila hal ini terjadi maka proses reformasi akan mandul dan mengalami stagnasi.

2. Majelis Amanat Rakyat (MARA)

Tanggal 22 Juli 1998 pertemuan MARA yang di laksanakan di Hotel Brobudur membahas masalah situasi politik terakhir saat itu, dari hasil diskusi tersebut, disepakati perlunya MARA mempersiapkan pembentukan Partai Politik, disamping fungsi semula sebagai gerakan moral. Pada tanggal 14 Mei 1998, sekitar 50 Tokoh Nasional mendeklarasikan Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang di pelopori oleh Prof. DR. H.M. Amien Rais. Sebagian anggota MARA berketetapan hati untuk membentuk partai baru, pada tgl 5 -6 Agustus 1998 pertemuan di Sirnagalih, setelah Amien Rais memberikan sambutan bersama Emil Salim dalam pertemuan tersebut, dan dipersiapkan platform bagi partai yang akan dibentuk yang dihadiri oleh tokoh-tokoh MARA.

MARA membentuk satu Tim Penyusun untuk membuat platform partai yang terdiri dari Mochtar Pabotinggi, Affan Gafardan Sjamsurizal Panggabean untuk bidang politik; Faisal Basridan Anggito Abimayu bidang ekonomi dan Albert Hasibuan bidang Hukum. Platform awal ditekankan pada 3 bidang ini.

3. Gagasan Suksesi Kepemimpinan Nasional

Pada masa rezim Orde Baru pengebirian pada setiap orang maupun kelompok yang berusaha bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan tersebut. Amien Rais menggulirkan wacana suksesi kepemimpinan Nasional, wacana tersebut digulirkan Amien Rais pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya tahun 1993.

4. Krisis Multidimensional (Krisis Ekonomi) pada awal tahun 1997

Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia berimbas pada Indonesia, yang berakibat juga pada krisis politik. Diantara negara-negara Asean, Indonesia mengalami krisis yang paling berat, nilai rupiah merosot pada angka yang tidak rasional yakni Rp. 17.000/dollar AS. Barang-barang kebutuhan pokok semakin langka bahkan tidak tersedia dipasaran, daya beli masyarakat terus menurun sementara harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

5. Gerakan Menuntut Reformasi

Pengangkatan Soeharto menjadi presiden ketujuh kalinya pada Sidang Umum MPR 1998 dan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII, menuai tuntutan dari kaum reformis supaya Soeharto turun dari kursi presiden. ABRI menggagas dialog Nasional, oleh kalangan reformis dianggap sebagai skenario penguasa untuk menahan gelombang gerakan protes yang lebih besar. Gerakan demonstrasi Mahasiswa menjadi semakin besar

setelah terjadi insiden Tragedi trisakti yang menewaskan 4 Mahasiswa dan 20 Mahasiswa luka-luka.

Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang terdiri dari kurang lebih 40 ormas Islam yang disponsori Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) menginginkan dibentuknya sebuah partai politik baru yang berbasis eks Masyumi, meminta Amien Rais memimpin partai tersebut tapi ditolak dengan halus, Pada tgl 23 Juli 1998, Amien Rais diundang dalam pertemuan di pondok Indah oleh tokoh-tokoh Amien Rais hampir masuk partai tersebut, tapi tak sampai 2 hari berita bergabungnya Amien Rais ke PPP mendadak urung, dikarenakan masih adanya resistensi didalam tubuh partai tersebut.

Pertemuan 5-6 Agustus 1998 di Wisma Tempo Mega Mendung Bogor menghasilkan nama baru partai yang dibentuk, pertemuan ini berhasil menginventarisir beberapa nama dari mulai Partai Amanat Rakyat (PAR), Partai Pencerahan Indonesia Baru (PPIB), Partai Amanat Bangsa (PAB) dan Partai Amanat Nasional. Dua nama menguat adalah PAR dan PAN, Faisal Basri lebih condong ke PAR,akhirnya diambil voting sampai tengah malam PAR mendapat 13 suara dan PAN mendapat 16 suara, maka di tetapkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang dibentuk oleh MARA, PPSK Gajah Mada dan Kelompok Tebet.

Rencana deklarasi jatuh padah tanggal 17 Agustus 1998 bertepatan hari kemerdekaan Indonesia karena formatur belum merampungkan tugasnyadalam melengkapi kepengurusan maka diundur waktu selama 7 hari, dengan persiapan yang sangat berat maka pada minggu tanggal 23 Agustus

1998 di Istora Senayan Jakarta di deklarasikan Partai Amanat nasional (PAN), dengan lambang matahari dengan sinar 3yang yang didesign oleh Joko HP menjadi logo PAN.

Pendiri PAN yang tercatat sampai dengan hari ini adalah M. Amien Rais, Faisal H Basri, Patrialis Akbar, AM Fatwa, Syamsurizal Panggabean, Zoemrotin, AM Lutfi, Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Muhammad, Ismid Hadad, Dawam Raharjo, Amin Aziz, Achmad Arief, K. Sindhunata, M. Najib, Al Hilal Hamdi, M. Hatta Radjasa dll.

B. Lambang Partai Amanat Nasional dan Artinya

Pada tanggal 5 Februari 1999 PAN mengajukan surat NO. PAN/B/WS/031/II/1999, tentang permohonan pengesahan pendirian partai politik ke-Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Dan tanggal 9 Februari 1999, DepKeh HAM mengirim surat No. 005/B/PP-PARPOL /II/1999 kepada Direktur Percetakan Negara RI, tentang pengesahan dan pendaftaran dan pengesahan pendirian partai No. 06.08-27 PARTAI AMANAT NASIONAL sebagai badan hukum.

Gambar 1. Lambang Partai Amanat Nasional



Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_Partai_Amanat_Nasional.jpg

Lambang Partai Amanat Nasional adalah matahari putih dengan pancaran sinar cerah yang dilatarbelakangi bujur sangkar warna biru dengan tulisan PAN dibawahnya.

1. Filosofi dari lambang PAN

Matahari putih bersinar cerah dilatarbelakangi bujur sangkar warna biru dengan tulisan PAN di bawahnya, merupakan simbolisasi bahwa Partai Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

2. Makna Lambang PAN

Gambar Matahari yang bersinar terang: matahari merupakan sumber cahaya, sumber kehidupan. Warna putih adalah ekspresi dari kebenaran, keadilan, dan semangat baru. Sinar terang yang memancar adalah refleksi dari kemajemukan. Bujur sangkar berwarna biru tua: cerminan warna laut dan langit yang merefleksikan kemerdekaan atau demokrasi.

C. Visi, Misi, Fungsi Dan Struktur Kepemimpinan Partai Amanat Nasional

1. Visi Partai Amanat Nasional

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yg adil dan Makmur, pemerintahan yg baik & bersih

didalam negara Indonesia yg demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa.

2. Misi Partai Amanat Nasional

- a) Mewujudkan kader berkualitas dan militan;
- b) Mewujudkan PAN sebagai Partai yang dekat dan membela Rakyat;
- c) Mewujudkan PAN sebagai partai modern berdasarkan sistem dan manajemen unggul, serta budaya orang yang luhur;
- d) Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat;
- e) Mewujudkan tata Pemerintahan Indonesia yang bersih, yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f) Mewujudkan Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan Internasional.

3. Fungsi Partai Amanat Nasional

1. Menjadi pemersatu bagi negara kesatua republik indonesia (NKRI);
2. Menjadi alat perjuangan untuk menegakan kedaulatan rakyat.

4. Struktur Kepemimpinan Partai Amanat Nasional

a) Struktur kepemimpinan partaiterdiri atas :

- 1) Dewan pimpinan pusat (DPP) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai ditingkat Nasional;
- 2) Dewan pimpinan wilayah (DPW) adalah kesatuan adalah kepemimpinan organisasi partai ditingkat provinsi;
- 3) Dewan pimpinan daerah (DPD) adalah kesatuan dari kepemimpinan organisasi partai ditingkat kabupaten/kota;
- 4) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai ditingkat kecamatan'atau nama lain yang setingkat;
- 5) Dewan Pimpinan Rantin (DPRt) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat kelurahan/desa/nagari dan/atau nama lain yang setingkat;
- 6) Rayon dan subrayon adalah organisasi yang di bentuk dibawah tingkat kelurahan/desa.

- b) Koordinator Luar Negerii (KLN) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai diluar negeri dengan wilayah kerja di tingkat negara.
(Anggaran Dasar PAN)

D. Anggota Kader Dan Simpatisan

Ketentuan penerimaan anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan anggota bersifat terbuka bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dewasa, berjiwa reformis, menyetujui dan mendukung platform partai, Garis Perjuangan Partai, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai;
2. Calon anggota dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan domisili yang bersangkutan
3. Dalam hal khusus, Dewan Pimpinan Pusat dapat menolak permintaan seseorang menjadi anggota .
4. Bagi seseorang yang disetujui menjadi anggota Partai Amanat Nasional akan di berikan Kartu Tanda Anggota (KTA)

E. Sistem Kaderisasi

1. Jenjang dan jenis kaderisasi terdiri atas perkaderan formal dan nonformal;
2. Jenjang kaderisasi formal terdiri atas;
 - a) Kader Dasar adalah anggota yang telah lulus mengikuti Latihan Kader Amanat Nasional (LKAD);
 - b) Kader Madya adalah anggota yang telah lulus mengikuti Latihan Kader Amanat Madya (LKAM);
 - c) Kader Utama adalah anggota yang telah lulus mengikuti latihan kader Amanat Utama (LKAU);
3. Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan Latihan Kader Amanat Utama (LKAU); Dewan Pimpinan Wilayah melaksanakan latihan kader Amanat Madya (LKAU), Dewan Pimpinan Wilayah melaksanakan Latihan Kader

Amanat Utama (LKAM), dan dewan pimpinan daerah melaksanakan Istihsn kader Amanat Dasar (LKAD).

4. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah harus melaksanakan perkaderan formal sekurang kutrangnya satu kali dalam setahun
5. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah , dan Dewan Pimpinan Daerah dapat melaksanakan perkaderan nonformal sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk meningkatkan pengetahuannya mengembangkan kapasitas, dan keterampilan anggota sesuai dengan jenis kegiatan tertentu.
6. Ketentuan tentang kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur lebih lanjut dalam peraturan partai. (AD/ART PAN)

F. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung

Dewan pimpinan wilayah adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam dalam memimpin partai di tingkat tertinggi dalam memimpin partai di tingkat tertinggi dalam memimpin partai ditingkat provinsi untuk masa jabatan selam lima tahun. Dewan pimpinan wilayah berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai tingkat provinsi terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, memuaskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat;

Dewan pimpinan wilayah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk;

1. Menentukan kebijakan partai di tingkat provinsi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ketetapan kongres dan musyawarah wilayah, keputusan rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah, dan keputusan partai lainnya sesuai keputusan partai.
2. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural dari dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan ranting dan pimpinan rayon;
3. Mengesahkan susunan dewan pimpinan daerah sesuai hasil keputusan musyawarah;
4. Membatalkan, meluruskan dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh pimpinan daerah yang bertentangan dengan anggaran rumah tangga, ketetapan kongres, musyawarah, wilayah, dan rapat kerja daerah, serta keputusan lainnya sesuai peraturan partai;
5. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat dewan melalui penambahan unit kerja sesuai kebutuhan partai.
6. Mengangkat pelaksanaan pelaksana tugas ketua dewan pimpinan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepemimpinan partai di tingkat tersebut.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung beralamat di Jl. Griya Kencana Blok F-8 RT. 03 LK 1 Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/049/IX/2017 jumlah pengurus DPW PAN Provinsi Lampung adalah 234 Orang. Irfan Nuranda Djafar adalah Plt Ketua

DPW PAN Provinsi Lampung periode 2015-2020, sebelumnya diketuai oleh Dr. Hi. Zainudin Hasan, S.H., M.Hum.

DPW Pan Provinsi Lampung periode 2015-2020 memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan konsolidasi, koordinasi dan pembinaan organisasi kepada DPD, DPC, dan DPRt PAN se Provinsi Lampung secara intensif dan berkelanjutan serta mempercepat program suksesi kepemimpinan partai melalui Musda, Muscab dan Musran di setiap eselon Dewan Pimpinan Partai agar terlaksana dengan lancar, tertib dan aman;
2. Melakukan supervisi dan pembinaan kepada DPD, DPC, dan DPRt PAN se Provinsi Lampung untuk menyusun dan menetapkan program kerja partai periode 2015-2020 secara terkoordinasi;
3. Menata sistem pengelolaan administrasi, kesekretariatan dan keuangan PAN di Lampung untuk mendukung kinerja partai beserta penyusunan laporan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan partai dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan program Pemenangan Pilkada, Pemilu, mempercepat pemenuhan persyaratan verifikasi partai politik, dan menyampaikan laporan perkembangan pencapaiannya secara periodik kepada DPP PAN;
5. Menjaga nama baik partai, menegakkan disiplin organisasi dan mengembangkan peranserta kader dalam kegiatan kepartaian sehingga PAN di Lampung dapat tumbuh dan berkembang menjadi partai yang maju dan memenangkan pemilu 2019;

6. Melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya dengan semangat juang yang tinggi, profesional, adil, menjunjung tinggi transparansi dan kerjasama dalam mengelola organisasi Partai Amanat Nasional di Lampung. (SK DPP PAN Nomor :PAN/A/Kpts/KU-SJ/049/IX/2017).

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara teoritis sesuai dengan prinsip kaderisasi FSBKU yang berupa :

1. Proses Pilih, DPW PAN mendelegasikan seluruh kader untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dalam upaya melakukan proses pilih atau seleksi, hasil pendekatan langsung kepada masyarakat disambut dengan proses pilih secara organisasional dimana masyarakat yang telah dipilih oleh kader dalam bentuk mabita (Masa Bimbingan Anggota). Hal ini dilakukan dalam upaya menyamakan *frame* calon-calon anggota yang berlatarbelakang berbeda-beda.
2. Proses Didik, Secara Formal :jenjang kaderisasi PAN terdiri atas LKAD (Latihan Kader Amanat Dasar) yang diselenggarakan oleh DPD PAN, LKAM (Latihan Kader Amanat Madya) yang diselenggarakan oleh DPW PAN, dan LKAU (Latihan Kader Amanat Utama) yang diselenggarakan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Proses didik yang dilakukan oleh DPD, DPW dan DPP PAN dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Dalam 2 tahun terakhir DPW PAN Provinsi

Lampung belum menyelenggarakan LKAM namun menyelenggarakan LKAD pada tanggal 22-24 Desember 2017. Terjadi tumpang tindih wewenang dan tugas dalam penyelenggaraan pendidikan secara terstruktur (formal) antara DPW dan DPD PAN di Provinsi Lampung.

3. Proses Ikut, Proses ikut yang dilakukan DPW PAN dalam bentuk penempatan kader secara internal maupun eksternal, secara internal yakni para kader diberikan tugas lebih sebagai pengurus partai dalam rangka mengikat kader, diketahui terdapat 234 orang pengurus DPW PAN Provinsi Lampung. Secara eksternal DPW PAN Provinsi Lampung melakukan penempatan yakni para kader yang diamanatkan di lembaga eksekutif maupun legislatif, adapun legislator ditingkat Provinsi Lampung sebanyak 8 orang dari PAN, dan sebelumnya terdapat kepala daerah dari PAN sebagai Bupati Lampung Selatan yang hari ini berstatus non aktif.
4. Proses Pengawasan, Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPW PAN diklasifikasikan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Secara terstruktur mekanismenya dilakukan dalam bentuk rapat-rapat dan Muswil yang sesuai dengan AD/ART PAN. Sedangkan mekanismenya dalam bentuk mentoring atau pendekatan secara personal. Namun proses pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif karena tidak adanya aturan baku akan dalam proses pengawasan secara tidak terstruktur.
5. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan proses kaderisasi yang dilakukan oleh DPW PAN telah berjalan sebagaimana teori

kaderisasi FSBKU. Namun dalam proses didik dan pengawasan pelaksanaannya kurang maksimal.

B. Saran

Partai PAN merupakan lembaga politik yang berasaskan Pancasila. Secara formal proses kaderisasi DPW PAN telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun dalam sub proses kaderisasi ada yang tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu diperlukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Proses Pilih, walaupun Partai Amanat Nasional bersifat terbuka dalam rekrutmen, Kader diharapkan dapat melakukan pendekatan secara personal secara kolektif kolegial dengan penuh kesadaran ketika terjun ke masyarakat sehingga terdapat prioritas orang-orang yang masuk kedalam partai adalah mereka yang memiliki dasar perjuangan yang sama dengan partai.
2. Proses didik, dalam proses didik DPW PAN Provinsi Lampung diharapkan dapat mengawal DPD yang ada dibawah naungannya untuk dapat menyelenggarakan LKAD secara mandiri serta DPW PAN dapat menyelenggarakan LKAM sesuai dengan amanah AD/ART hasil Kongres.
3. Proses Ikat, proses ikat yang dilakukan oleh partai sudah baik, dengan mendorong kader-kader terlibat aktif dalam kerja-kerja partai sampai dengan mandat yang diberikan untuk kader untuk menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif, namun yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa mandat itu diberikan, jangan sampai orang yang menerima mandat

tersebut justru mencoreng nama baik partai dengan melakukan tindak pidana korupsi, karena itu sudah tidak selaras dengan amanah kongres dalam AD/ART.

4. Proses Pengawasan, proses pengawasan DPW PAN perlu untuk membuat tim adhoc mentoring yang disahkan guna melakukan pelatihan untuk melatih kader agar dapat menjadi mentor sebagai langkah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas kader-kader yang menduduki lembaga legislatif dan eksekutif untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader yang menjadi legislator ataupun kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011 *Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan - Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2008. *Konstruksi Sosial Media Masa*. Jakarta: Kencana
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Darmastuti, Ari dan Tabah Maryana. 2004. *Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia*. Universitas Lampung. Lampung
- Firmansyah,2011. *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- FSBKU, HAPSARI, SPP, PO, SRB tim kaderisasi. 2006 *Kaderisasi Organisasi Rakyat : Pengalaman Lima Organisasi Rakyat*.Bandung. Garis Pergerakan dan Pergerakan- People Centered Advocacy Institute
- Gaol ,J.L Chr. 2015. *A to Z Human Capital – Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Grasindo
- Amal, Ichsanul (ed.) 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.
- KPK, LIPI. 2016. *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta : KPK RI
- Labolo, Murhadam. Ilham ,Teguh .2015. *Partai Politik dan sistem pemilihan umum Indonesia* .Depok : PT. Raja Grafindo Persada

- Latief, Yudi. 2012. *Negara Paripurna (Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2013. *Sistem Politik Indonesia, Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moelong, J Lexy. 2007. *Metodologi Peneletian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Machiavelli, Nicollo. 2015 *The Prince The Famous Analysis of Statesmanship and Power 1957 (Public domain)*. Surabaya. Stomata. Penerjemah : Natalia Triaji
- Nazir, Moh. 2005 *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nawawi Handari, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta :Gajah Mada University Press
- Newton, Kenneth. Van Deth Jan W. 2016. *Perbandingan Sistem Politik (Teori dan Fakta)*. Bandung. Nusa Media. Penerjemah. Imam Mutaqqin
- Prasetyo, Bambang dan Lina Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Rivai, Veithzal. 2017. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grassindo
- Tangdilintin, Philips Drs. 2008 *Pembinaan Generasi Muda*. Yogyakarta: Kanisius

Jurnal & Skripsi :

- Beni Azhar Assadan. 2014 *Partai Politik dan Kaderisasi Politik: Studi Kasus Yuddy Chrisnandi Lily Chadidjah Wahid, dan Patrice Rio Capella*. Jakarta : Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
- Harahap Insan Harapan. 2018 *Jurnal Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*, Jakarta : Bakrie University
- Kadir A. Gau. 2014. *Dinamika Partai Politik di Indonesia Sosio Humaniora*. Bandung : Universitas Padjajaran. Jurnal Vol 16 No 2, Hal.132.

Mochtar ,Mas'ud . Colin ,Mas Andrews (Eds). 1978 *Studi Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University, press 1978 hlm.29

Putra D Alvian. 2014. *Skripsi Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia*. Malang : Brawijaya University

Samuel, Vernanda. 2017. *Skripsi Pola Kaderisasi Partai Politik (Studi Deskriptif: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi Sumatra Utara Periode 2016-2021)*. Sumatra Utara : Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Undang-Undang :

Kitab UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Kitab UU No. 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik BAB V Pasal 10 ayat 3

Dokumen :

Laporan Tahunan KPK tahun 2017

Buku Pedoman AD/ART DPW PAN Provinsi Lampung

SK Perubahan Kedua Kepengurusan DPW PAN Periode 2015-2020

Sumber Lain :

www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/906 (diakses pada tanggal 17 Oktober 2018)

www.idntimes.com.cdn.amproject.org (diakses pada tanggal 10 November 2018)

<https://news.detik.com/berita/4264599/kpk-tetapkan-bupati-zainudin-hasan-tersangka-pencucian-uang>, (Diakses Tanggal 27 Januari 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Lampung, diakses pada 25 Februari 2019.

id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_Partai_Amanat_Nasional.jpg. diakses pada 25 Februari 2019.